BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Untuk memperoleh pijakan ilmiah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah yang sudah dibuat sebelumnya dan berkaitan dengan masalah sama yang diangkat dalam skripsi peneliti yakni masalah pelestarian hutan. Dari sekian banyak karya ilmiah yang ditemukan peneliti, terdapat dua karya ilmiah yang cocok dengan masalah yang diangkat peneliti. Salah satu karya ilmiah tersebut adalah skripsi yang berjudul *"Upaya WWF-Indonesia Membangun Networking sebagai Usaha Konservasi Hutan di Kalimantan"* yang dibuat pada tahun 2010 oleh Muhammad Reza Antony, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam skripsi tersebut peneliti yang bersangkutan mengangkat masalah pelestarian hutan dengan subjek *World Wildlife Fund for Nature* (WWF) sebagai aktor utama dalam pandangan Ilmu Hubungan Internasional, hutan di Kalimantan secara umum dan upaya WWF dalam membangun *network* atau jaringan kerja dengan berbagai institusi baik dari pemerintah Indonesia maupun non pemerintah lainnya yang memiliki *concern* yang sama, yakni pelestarian hutan. INGO ini dikatakan berhasil dalam melakukan dan memelihara *networking* dengan berbagai aktor atau institusi lain sampai sekarang.

Karya tulis lain yang membahas permasalahan yang sama adalah tesis yang berjudul *"Peranan Non Governmental Organization (NGO) dalam Hubungan*

Internasional: Studi Kasus Kegagalan Greenpeace dalam Menghentikan Kerusakan Hutan Amazon di Brazil" yang dibuat pada tahun 2004 oleh Kiky Rizky, Universitas Indonesia.

Tesis tersebut menjelaskan bahwa *Greenpeace* sebagai *International Non Governmental Organization* (INGO) lingkungan hidup terkemuka di dunia mengalami kegagalan dalam melestarikan hutan hujan tropis Amazon di Brazil. *Greenpeace* sebagai subjek utama dalam tesis tersebut dinyatakan mengalami ketidakberdayaan karena *power* yang dimilikinya rupanya lebih lemah dibandingkan dengan *power* berbagai aktor lainnya di Brazil, walaupun bisa saja ia dikatakan berhasil dalam melakukan berbagai aksi seperti mengidentifikasikan masalah, protes langsung terhadap pemerintah negara tersebut, memperoleh perhatian dari media massa, dan segera menghilangkan diri dari wilayah tersebut.

Secara lebih lanjut kegagalan INGO ini disebabkan karena ia mengalami keterbatasan dalam melakukan intervensi lebih lanjut di negara tersebut dan memaksa aktor lain untuk mengikuti kehendaknya. Pelanggaran terhadap pelestarian hutan di negara tersebut hanya dapat ditangani oleh pemerintah yang bersangkutan, selaku aktor utama yang dapat menerapkan kebijakan terhadap hutan Amazon.

Pemerintah juga memiliki hubungan dengan aktor lain seperti industri kayu yang melakukan penebangan hutan yang dapat melawan siapa saja, termasuk *Greenpeace* yang menentang cara mereka dalam memperlakukan hutan secara tidak bertanggungjawab. Hal tersebut tampak dari senjata yang dimiliki para tenaga penebang pohon yang dimiliki industri tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa pengaruh aksi *Greenpeace* hanya bersifat moral-spiritual karena secara praktis masih sulit untuk mengubah realitasnya.

Secara lebih rinci perbandingan dua karya ilmiah tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka

Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Reza Anthony (Universitas Katholik Parahyangan)	*"Upaya WWF-Indonesia Membangun Networking sebagai Usaha Konservasi Hutan di Kalimantan"*	Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai alat analisis	WWF dinyatakan berhasil dalam membangun dan mempertahankan *networking* dengan berbagai institiusi lain dalam melestarikan hutan Kalimantan	Penelitian ini berfokus pada masalah pelestarian hutan dari berbagai tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap hutan	• Penelitian ini memiliki objek konservasi hutan di Kalimantan, Indonesia • WWF sebagai subjek penelitian dinyatakan berhasil menjalankan tugasnya • WWF adalah aktor lain yang juga memegang peranan kuat dalam Hubungan Internasional
Kiky Rizky (Universitas Indonesia)	*"Peranan Non Governmental Organization (NGO) dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Kegagalan Greenpeace dalam Menghentikan Kerusakan Hutan Amazon di Brazil"*	Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai alat analisis	*Greenpeace* dinyatakan gagal dalam melestarikan hutan hujan tropis Amazon karena ia hanya memiliki *power* yang terbatas dibandingkan dengan uang dan kedaulatan pemerintah Brazil. Dengan demikian negara tetap menjadi aktor utama dalam pandangan Ilmu Hubungan Internasional	Penelitian ini berfokus pada masalah pelestarian hutan dari berbagai tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap hutan	• Penelitian ini memiliki objek kerusakan hutan Amazon, Brazil • *Greenpeace* sebagai subjek penelitian dinyatakan gagal secara praktis dalam menjalankan tugasnya • Negara tetap merupakan aktor utama dalam Hubungan Internasional

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.2.1.1. Hubungan Internasional

Layaknya kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan politik yang saling membutuhkan, melakukan interaksi, dan memberikan pengaruh satu sama lain, demikian pula hubungan internasional terjadi karena negara juga memiliki hakikat sosial dan politik seperti manusia yang menyebabkan negara tersebut menyadari apa saja potensi atau kekuatan yang dapat digunakannya untuk mempengaruhi negara lain dan kekurangannya yang berupa ketidakcukupan atau ketiadaan potensi, namun potensi yang tidak dimilikinya berada di negara lain. Akibatnya negara-negara yang ada di dunia melakukan interaksi satu sama lain untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing maupun bersama.

Sebelumnya, terdapat beberapa pengertian tentang hubungan internasional itu sendiri. Evans melalui Kurian dalam "*The Dictionary of World Politics"* menyatakan bahwa hubungan internasional adalah "istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara (2005:4). Hubungan internasional berbicara tentang interaksi yang terjadi antara negara sebagai aktor utama itu sendiri secara umum maupun individu dan organisasi dengan aktor-aktor serupa lainnya yang berada di luar batasan geografisnya.

Batas-batas negara lainnya dapat berupa perbedaan ideologi politik, ekonomi, dan lainnya yang bisanya menjadi pemicu utama hubungan antar berbagai negara di dunia ini untuk melengkapi dirinya masing-masing dengan sumber daya yang tidak ia miliki. Menurut Mc. Clelland hubungan internasional adalah "suatu studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang mengelilingi interaksi" (1990:30).

Mempelajari hubungan internasional adalah mempelajari interkasi antara dua negara atau lebih, siapa saja yang menjadi aktor yakni aktor negara dan bukan negara, apakah itu individu atau organisasi internasional, dan apa saja manfaat serta pengaruh dari intertaksi tersebut. Dalam hubungan internasional, keadaan-keadaeran yang relevan memiliki arti bahwa terdapat beberapa keadaan atau masalah yang sama, dihadapi banyak negara atau hampir seluruh dunia, yang membuat manusia sebagai entitas sosial secara umum atau negara secara khusus memiliki *urgency* untuk melakukan interaksi yang berlanjut pada kerjasama antara satu sama lain, yang biasanya tidak hanya memiliki tujuan untuk menghadapi masalah yang sama tersebut, tetapi juga memenuhi kepentingan masing-masing negara yang beragam pula.

Hal ini diperkuat oleh Jackson dan Sorensen dalam *"Pengantar Studi Hubungan Internasional"* di mana dalam hubungan internasional, kekuatan masing-masing negara ini akan menentukan bagaimana pola hubungan terjadi

antara negara tersebut dengan negara lain dalam memenuhi kepentingan negerinya.

Negara yang memiliki kekuatan cukup atau lebih baik dibanding negara lain, baik itu yang bersifat nyata atau tidak nyata biasanya memiliki ketergantungan rendah dalam pemenuhan kepentingannya dan mampu memberikan pengaruh kuat pada negara lain yang menjadi mitra kerjasamanya dalam memelihara kerjasama tersebut agar pemenuhan kepentingannya tidak berhenti, sedangkan negara yang memilikim kekuatan yang kurang mencukupi memiliki ketergantungan tinggi pada negara lain dan menerima pengaruh kuat dari negara yang menjadi mitra kerjasamanya. Jika negara-negara yang terlibat memiliki kekuatan yang seimbang biasanya mereka juga memiliki tingkat ketergantungan yang seimbang pula antara satu sama lain (2009:23-27).

2.2.1.2. Kerjasama Internasional

Archer dalam *"International Organization"* mendefinisikan kerjasama internasional sebagai:

> "Perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lainnya. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan" (2007:34).

Dari definisi kerjasama internasional ini dapat diperkirakan bahwa "wadah" yang dimaksud adalah suatu atau banyak instrumen atau pelaku hubungan instrumen internasional itu sendiri. Khusus dalam tulisan ini organisasi internasional, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam bab ini, merupakan salah satu bentuk wadah yang berfungsi sebagai penetap tujuan dan kepentingan yang hendak dicapai atau dipenuhi dengan kerjasama dalam berbagai bidang ilmu yang menentukan hajat hidup masyarakat dunia yang hakiki.

Sugiono melalui Hadiwinata dalam *"Politik Bisnis Internasional"* menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional yakni:

1. Negara bukan lagi aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kebudayaan bersama dengan aktor ekonomi dan sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya. Melainkan juga oleh institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang beragam dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (2006:2).

Faktor di atas menyatakan bahwa negara bukan lagi satu-satunya aktor utama dalam politik internasional karena sekarang sudah banyak aktor-aktor

lain seperti individu dan organisasi internasional yang bergantung atau tidak bergantung pada pemerintah negara masing-masing yang bebas melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingannya sendiri yang entah sejalan atau kurang sejalan dengan kepentingan negara asalnya dalam konteks ekonomi, dalam jangka waktu yang akan habis jika kepentingan ekonomi tersebut telah tercapai.

Jika pencapaian tersebut terjadi maka kerjasama bisa saja benar-benar berhenti atau hanya fokus kerjasama itu sendiri yang berubah. Dalam tulisan ini kerjasama internasional dalam bidang lingkungan hidup biasanya bersifat hampir selalu berjalan dengan kepentingan pemerintah dan tidak akan pernah habis karena lingkungan hidup memerlukan kepedulian tiada akhir dari manusia yang hidup di bumi ini.

Kerjasama internasional ini ditentukan oleh wadah macam apakah yang bertujuan memenuhi kepentingan di bidang apa pula. Dengan kata lain tidak ada wadah yang mampu menjadi tempat pergumulan semua kepentingan atau masalah dari semua bidang yang menjadi *urgency* negara-negara di dunia ini.

Kerjasama internasional masa kini sudah dilakukan oleh berbagai aktor yang memiliki berbagai agenda pribadi. Fenomena ini dinyatakan Chandler dalam *"Constructing Global Civil Society: Morality and Power in International Relations"* yakni:

> "Saat ini aktor utama dalam hubungan internasional, bangsa-negara, tampak kehilangan kapasitas atau keinginannya untuk mengejar kepentingannya sendiri yang ditafsirkan dalam hal kekuatan. Berbagai komentator dari beragam perspektif teoritis berpendapat bahwa bangsa-negara yang paling maju menganggap diri mereka sendiri sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab moral kepada masyarakat internasional. Kerangka kerja teoritis utama bagi pemahaman lingkup internasional, berhubungan dengan kepentingan negara…tampak kehilangan kekuatannya. Dibandingkan kepentingan nasional dan negara yang membentuk arah kebijakan, tampak sebuah agenda baru yang ditetapkan oleh aktor non negara" (2007:54).

Di sini kita melihat bahwa seiring dengan perkembangan waktu negara mengalami penurunan kekuatan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Penurunan kekuatan tersebut disebabkan karena memang tidak ada aktor hubungan internasional yang benar-benar memiliki kekuatan absolut untuk memenuhi kepentingan pribadinya, bahkan kebutuhan yang dimiliki masyarakat internasional.

2.2.1.3. Organisasi Internasional

Jika wadah tersebut ditafsirkan langsung sebagai aktor selain pemerintah formal, seperti organisasi internasional, maka organisasi internasional amat beragam berdasarkan kepentingan yang diperjuangkan sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi minatnya. Rudy dalam *"Administrasi dan Organisasi Internasional"* mendefinsikan organisasi internasional sebagai:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda" (2005:3).

Berdasarkan definisi di atas kita dapat melihat beberapa unsur organisasi internasional yang berbeda dengan organisasi pada umumnya yakni:

1. Memiliki kerjasama yang ruang lingkupnya melewati batas negara
2. Mencapai berbagai tujuan yang disepakati bersama
3. Baik antar pemerintah maupun non pemerintah
4. Memiliki struktur organisasi yang lengkap dan jelas
5. Melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan

Archer dalam *"Pengantar Ilmu Hubungan Internasional"* mendefinisikan organisasi internasional sebagai:

> "Organisasi yang formal, ditetapkannya struktur yang berkelanjutan melalui persetujuan di antara anggota-anggota, baik perwakilan dari pemerintah maupun bukan pemerintah yang setidaknya terdiri dari dua negara berdaulat yang memiliki tujuan untuk menjalankan kepentingan-kepentingan dari para anggotanya" (2005:92).

Dengan demikian organisasi internasional berdiri secara matang demi mencapai tujuan yang merupakan kepentingan vital masyarakat yang

disepakati, yang sudah jelas merupakan wujud manusia sebagai masyarakat dunia akan kelangsungan kehidupannya.

Toma & Gorman dalam *"International Relations: Understanding Global Issues"* mengklasifikasikan organisasi internasional menjadi dua macam yakni organisasi antarpemerintah *(intergovernmental organizations, IGO)* dan organisasi internasional non pemerintah (*international non-governmental organization)*. IGO dibentuk oleh negara-negara untuk memudahkan dan mengatur hubungan di antara negara-negara.

IGO dapat dibentuk secara bilateral, regional, atau universal. Umumnya ia memperoleh otoritas dari perjanjian yang dibuat oleh negara walau pada masa kini IGO umumnya dibentuk di bawah pimpinan atau perlindungan organisasi-organisasi yang ada. Ia memiliki dana, berbagai pertemuan rutin, markas besar, dan sekretariat yang merupakan badan yang menjalankan program yang telah disusun oleh para anggotanya (1991:250-251).

2.2.1.3.1. *International Non-Governmental Organization* (INGO)

Henderson dalam *"International Relations: Conflict and Corporation at The Turn of 21th Century"* mendefinisikan INGO sebagai:

> "INGO merupakan organisasi-organisasi swasta di mana setiap individu dari berbagai negara yang menyebar dan melintasi batas-batas negara dapat membuat suatu lingkungan masyarakat global dibandingkan dengan aktor lainnya" (1998:450).

Dari definisi ini kita dapat melihat bahwa INGO memiliki kelebihan yang menjadi ciri khasnya yakni ia mampu memiliki anggota dan pendukung yang jumlahnya dapat hampir meliputi semua penduduk dunia. Karena ia bersifat independen, memiliki tujuan yang tepat sasaran, dan memiliki fleksibilitas memadai, INGO memiliki kemampuan yang berkisar menegah ke atas dalam memenuhi tuntutan atau *urgency* yang biasanya tidak mampu seutuhnya dipenuhi oleh pemerintah lokal atau organisasi internasional lainnya.

Sedangkan Heins dalam *"NGO's in International Society"* mendefinisikan *non governmental organizations* (NGO) sebagai:

> "NGO merupakan berbagai asosiasi sukarela yang tidak berjuang untuk kekuatan kepemerintahan dan tidak juga memiliki mandat pemerintah atau negara bagi keberadaan dan kegiatannya. Mereka tidak berdiri dan berbicara untuk diri mereka sendiri, namun bagi orang lain yang dianggap tidak bersalah, tertekan, berjuang, diabaikan, tidak terwakili, terbuang, tidak terpromosikan, dikeluarkan, dan terlupakan secara simbolis. Kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pihak ini berhubungan dengan erat asosiasi lain melewati batas-batas internasional, dan secara lebih luas terinspirasi oleh berbagai ide yang bersifat universal" (2008:19).

Dari definisi ini kita dapat menemukan tiga ciri utama NGO yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. NGO bukan merupakan bagian perjuangan untuk mendapatkan kekuatan pemerintah dalam dan/atau antarnegara. Independensi NGO dari pemerintah tampak dari pemisahan diri dari politik negara,

contohnya generasi pertama Greenpeace menyatakan kepada orang banyak bahwa garis-garis besar Perang Dingin bukan merupakan masalah besar sehingga mereka memiliki politik sendiri yakni "tidak berpolitik". NGO mengabaikan anggapan bahwa melakukan hal yang keliru dapat menjadi hal yang benar. Hal ini membuat mereka tampak lebih murni secara moral dibandingkan dengan organisasi pemerintah. Keterpisahan dari politik negara mengakomodasikan berbagai perbedaan orientasi ideologi.

2. Kegiatan NGO diprakarsai oleh minat pada kebaikan akan sesuatu, bukan anggota-anggotanya, namun orang yang berada di luarnya yang bahkan tidak mengetahui keberadaan entitas tersebut. NGO tidak hanya menunjukan orientasi yang kuat pada berbagai isu dan kelompok di luar dirinya, tetapi juga mereka bertindak untuk kebutuhan berbagai pihak yang berada jauh darinya.

   Contohnya di Inggris, NGO dan pemerintah bersama menanggulangi pemanasan global, walaupun dari pemanasan global tersebut Inggris akan mengalami penaikan suhu yang memberikan keuntungan seperti percepatan panen. Namun karena negara lain justru mengalami kerugian maka berbagai NGO di Inggris bertindak demikian. NGO sebaiknya didefinisikan dalam konteks moral, tidak seperti negara, yang hanya dapat didefinsikan dalam konteks pencapaian apapun yang diinginkannya pada waktu tertentu.

3. Kegiatan NGO tidak dibatasi dalam suatu wilayah. Dalam konteks non teritorialitas ini, NGO disebutkan sebagai INGO yang merupakan aktor lintas batas yang memilih wilayah untuk melakukan operasinya, mencari informasi dan pendapatan dalam skala transnasional, dan berkontak dengan orang lain terlepas dari latar belakang nasional mereka.

Dalam konteks organisasional, non teritorialitas dapat berarti NGO berupaya membangun federasi yang terdiri dari berbagai cabang-cabang nasional yang bergabung dalam satu naungan, atau dapat berarti perkembangan berbagai organisasi terpusat yang menciptakan berbagai afiliasi nasional dalam citra organisasi induk (2008:18-19).

Biasanya INGO juga dikenal dengan sebutan NGO saja, namun perbedaan antara INGO dan NGO hanya terletak pada apakah ia sebuah organisasi non-pemerintah internasional atau tidak (lokal). Jika sebuah NGO di suatu negara sudah matang di tingkat lokal dan mampu membuka cabang di beberapa negara lain maka ia sudah bisa disebut sebagai INGO. NGO merupakan kelompok, asosiasi maupun pergerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari berbagai negara yang melakukan kegiatan sukarela. Merle dalam *"The Sociology of International Relations"* menyatakan NGO memiliki berbagai ciri yakni:

1. Berdiri berdasarkan inisiatif sendiri, ia berdiri secara spontan, terlihat dalam lingkungan internasional, dan terlepas dari campur tangan

pemerintah. NGO merekrut para individu yang tidak dipengaruhi oleh otoritas negara atau IGO.

2. Spontanitas, di mana NGO dibentuk oleh sekelompok orang dari beberapa negara. Hal ini membuktikan bahwa negara yang bersangkutan tidak dapat seutuhnya memenuhi harapan rakyatnya.

Kombinasi dari ciri spontanitas dengan solidaritas dalam kerangka kerja suatu organisasi (baik pergerakan maupun asosiasi) sehingga para individu yang ada mampu berperan dinamis dalam lingkungan internasional (1987:308-309).

The Union of International Association melalui Rudy dalam *"Administrasi dan Organisasi Internasional"* menyatakan berbagai kriteria untuk membentuk sebuah INGO yakni:

1. Tujuan organisasi harus sepenuhnya bersifat atau berciri internasional, dengan menegaskan keterlibatan organisasi lebih daripada sekadar hubungan bilateral, atau sekurang-kurangnya mencakup kegiatan organisasi pada tiga negara.
2. Keanggotannya harus terbuka, mencakup berbagai individu dan kelompok di wilayah atau negara dalam ruang lingkup organisasi tersebut, sekurang-kurangnya tiga negara.
3. Anggaran dasar organisasi harus mengandung ketentuan mengenai pemilihan atau pergantian pimpinan dan pengurus secara berkala atau periodik, dengan demikian tata cara pemilihan yang disusun

sedemikian rupa guna menghindari pengisian jabatan-jabatan dan pengendalian organisasi lainnya oleh orang-orang dari satu negara saja.

4. Pendanaan atau pembiayaan pokok bagi kegiatan organisasi harus berasal, atau mencakup sumbangan sekurang-kurangnya dari tiga negara (2005:20).

Dari berbagai uraian di atas dapat dikatakan bahwa INGO merupakan aktor independen yang cenderung bersifat netral dalam menyikapi berbagai isu global karena ia menetapkan kepentingannya bebas dari ego pemerintah, namun memang karena ia benar-benar mendasarkan kepentingannya pada moral dan nilai kebaikan universal.

2.2.1.4. *International Non-Governmental Organization* (INGO) Lingkungan Hidup

Le Roy dalam *"International Organization: Principles and Issues* menyatakan bahwa:

> "Terdapat beberapa NGO yang bergerak di berbagai bidang yang berbeda yakni industri, kesehatan, dan obat-obatan, ilmu pengetahuan, hubungan internasional. Namun sesuai dengan bertambahnya persoalan internasional di samping bidang tersebut maka NGO pun memiliki jumlah bidang yang bertambah sejak tahun 1957-1971 yakni teknologi, pertanian, ilmu pengetahuan, perekonomian dan keuangan, serta lingkungan hidup" (2002:355).

Dalam konteks lingkungan hidup, NGO atau INGO yang bergerak dalam bidang ini biasanya tergolong organisasi yang cenderung sejalan dengan kebijakan yang diambil pemerintah, seperti yang disebutkan sebagai salah satu latar belakang pembentukan NGO dalam tinjauan pustaka. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu negara pun yang memiliki pemerintahan yang benar-benar mampu menanggulangi persoalan lingkungan hidup, karena mereka masih harus berfokus pada persoalan lain yang lebih mendesak seperti politik, ekonomi, hukum, dan masih banyak lagi.

INGO yang bergerak dalam bidang ini mengalami peningkatan kekuatan politik di dunia internasional, karena ia bergerak dalam bidang yang menentukan hajat hidup umat manusia di muka bumi ini. Secara umum, berbagai INGO yang bergerak dalam bidang ini memiliki kelebihan yang belum tentu ditemukan dalam INGO yang bergerak dalam bidang lain. Hurrell dan Kingsbury dalam *"The International Politics of Environment: Actors, Interest, and Institutions"* menyatakan ciri-ciri khas tersebut sebagai berikut:

1. Memiliki pendukung dengan jumlah yang banyak di seluruh dunia dengan jaringan organisasi yang menyebar di seluruh dunia.
2. Memiliki peralatan dan fasilitas sumber daya sendiri yang berfungsi untuk mendukung tercapainya tujuan dalam perlindungan lingkungan hidup dunia.

3. Memiliki kemampuan dalam melakukan *lobby* politik dengan para pejabat pemerintah atau berbagai pihak yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di suatu negara.
4. Mampu melakukan berbagai penelitian ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat internasional tentang masalah yang terjadi dalam ekosistem dunia.
5. Memiliki hubungan yang efektif dengan media massa yang berfungsi sebagai benang merah dengan masyarakat internasional dalam memandang penyalahgunaan dan perlakuan semena-mena terhadap lingkungan hidup.
6. Memiliki peranan yang aktif dalam menentukan kebijakan penanganan masalah lingkungan. Mementingkan solusi atau pemecahan masalah, bukan konflik.
7. Mampu membangun jaringan kerja seluas mungkin demi pencapaian tujuan organisasi tersebut (1992:113-114).

INGO lingkungan hidup memiliki tujuh ciri tersebut di mana ia sudah memiliki pendukung yang banyak dari berbagai negara, memiliki peralatan atau fasilitas seperti laboratorium tersendiri termasuk di Indonesia, mampu melakukan *lobby* dengan pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan hidup termasuk di Indonesia.

Selain itu telah melakukan banyak penelitian yang hasilnya berbentuk berbagai jurnal, memiliki hubungan dengan media massa untuk terus

menyalurkan pesan moral dalam menjaga lingkungan, bersikap terbuka terhadap berbagai usul dan saran sehingga solusi dirumuskan bersama dengan masyarakat, dan sudah memiliki jaringan kerja seluas mungkin contohnya dengan WWF, *The Nature Conservancy* (TNC), *Birdlife Indonesia* (BI), *Forest Watch Indonesia* (FWI), dan *Fauna and Flora International* (FFI).

Rudy dalam *"Administrasi dan Organisasi Internasional"* menyatakan sebuah konferensi dengan nama resmi *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) telah membahas berbagai isu yaitu mulai dari kemiskinan, pencemaran, pertanian sampai lapisan udara di atas permukaan bumi. Dari konferensi tersebut terdapat empat dokumen penting yang telah disepakati yaitu Agenda 21, Prinsip-Prinsip Kehutanan, Konvensi Perubahan Iklim, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (2009:169-170).

Secara umum hasil konferensi ini menjadi landasan bagi semua aktor dalam hubungan internasional dalam melakukan pelsestarian lingkungan hidup yang dimilikinya. Khusus untuk berbagai INGO dalam bidang lingkungan hidup, hasil konferensi ini merupakan sebuah amanat utama yang diprioritaskan.

Hal ini diperkuat oleh Alonso dalam *"Still Counting…Biodiversity Exploration for Conservation, The First 20 Years of Rapid Assesment Program"* menyatakan bahwa CI sebagai INGO lingkungan hidup melakukan amanat tersebut dengan membantu para pemerintah dan masyarakat berbagai negara yang membutuhkan bantuan konservasi ekosistem darat maupun laut

di negara-negara berkembang sejak tahun 1990. Banyak spesies hewan dan tumbuhan terhindar dari kepunahan akibat rusaknya ekosistem hutan dan laut (2011:49).

2.2.1.5. Konsep Lingkungan Hidup

Soewartomo dalam *"Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan"* mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut: "Lingkungan hidup merupakan ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup lainnya. Mahkluk hidup tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya tetapi berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya" (1991:48). Dari definisi ini kita dapat melihat bahwa jika terdapat ruang atau tempat yang memiliki komponen-komponen lingkungan hidup, maka ruang atau tempat tersebut dapat dikatakan sebagai lingkungan hidup.

Dengan kata lain, interaksi yang dimaksud di sini tentu saja adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan makhluk hidup dengan benda-benda mati atau elemen dalam tempat tersebut. Interaksi dimulai dengan mahkluk hidup yang membutuhkan bahan baru benda-benda yang ada sehingga ia dapat bertahan hidup dan memperbanyak atau menghasilkan makhluk hidup lainnya. Kemudian benda atau elemen yang kemudian disebut sebagai SDA itu memerlukan makhluk hidup, dalam hal ini manusia untuk menjaganya agar tidak habis.

Sedangkan UU RI No. 4 Tahun 1982 melalui Indriyanto dalam *"Pengantar Budi Daya Hutan"* mendefinisikan lingkungan hidup sebagai:

> "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahkluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang berpengaruh pada kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya" (2008:94).

Dengan demikian konsep lingkungan hidup diperlengkapi dengan pemikiran bahwa kita sebagai manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup yang memiliki otoritas atas lingkungan hidup sendiri sehingga lingkungan hidup mampu mendukung kehidupan manusia di muka bumi ini.

Lingkungan hidup adalah isu yang menjadi agenda hubungan internasional selain isu politik dan keamanan. Jackson dan Sorensen dalam *"Pengantar Studi Hubungan Internasional"* mengurutkan isu lingkungan hidup sebagai isu ketiga setelah politik dan keamanan, kemudian isu lainnya adalah gender dan kedaulatan (2009:322-329).

Mereka mengemukakan bahwa persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan serius karena menyangkut kehidupan orang banyak secara langsung dan seiring dengan bertambahnya jumlah manusia setelah masa perang maka kebutuhan akan meningkat, begitu juga dengan tindakan mereka yang mempengaruhi lingkungan hidup terutama dengan cara-cara yang kurang bertanggungjawab.

Persoalan lingkungan hidup dalam hubungan internasional sebagai salah satu persoalan serius dikaitkan dengan bagaimana manusia menguasai teknologi dalam kehidupannya, terutama dalam mengelola lingkungan hidup itu sendiri. Dengan demikian timbul perdebatan tentang bagaimana manusia dengan teknologinya mampu bersikap dengan tanggungjawab.

Jackson dan Sorensen dalam buku yang sama menyatakan bahwa perdebatan tersebut terjadi antara kaum ekoradikal yang meyakini bahwa majunya teknologi belum tentu membuat manusia makin bijak dalam mengelola lingkungan hidup dan manusia sendiri merupakan bagian dari keseluruhan ekosistem sehingga manusia harus sebijak mungkin dalam mengelola lingkungannya. Kaum modernis meyakini bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam menangani persoalan lingkungan hidup karena manusia memegang kendali dengan keterampilannya menggunakan teknologi dalam mengelola lingkungan hidup (2009:325).

Kedua sisi tersebut memandang dari sudut pandang yang berbeda, namun jika kita lihat fenomena yang ada maka kita akan mengetahui bahwa di satu sisi keyakinan ekoradikal tercermin dalam berbagai kejadian di mana lingkungan hidup justru mengalami kerusakan dan penurunan kualitas akibat bertambahnya populasi manusia yang menggunakan teknologi yang cenderung merusak lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di sisi lain keyakinan kaum modernis juga tercermin pada berbagai kejadian yang menunjukkan bahwa manusia masih memiliki kesadaran akan

lingkungan hidupnya sehingga mereka menggunakan teknologi untuk menjaga kualitas lingkungan hidupnya. Dengan demikian semuanya bergantung pada manusia itu sendiri dan bagaimana ia menentukan prioritas kebutuhannya yang diperoleh dari lingkungan hidup itu sendiri.

Baylis dan Smith melalui Perwita dan Yani dalam *"Pengantar Ilmu Hubungan Internasional"* menyatakan bahwa kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global. Misalnya permasalahan yang menyangkut CFC berefek pada pemanasan global serta meningkatkan jenis dan kualitas penyakit akibat menipisnya lapisan ozon yang dirasakan seluruh dunia.
2. Isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfir.
3. Permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional, sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah sekitar (misalnya kebakaran hutan).
4. Banyak kegiatan eksploitasi atau degradasi lingkungan memiliki skala nasional atau lokal, dan dilakukan di banyak tempat di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, misalnya erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, polusi air, dan lain sebagainya.
5. Proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan yang berhubungan dengan berbagai proses

politik dan sosial ekonomi yang lebih luas, di mana berbagai proses tersebut merupakan politik ekonomi global (2005:144).

Sedangkan menurut *World Resource Institute* (WRI) melalui Ekins dalam *"Economic Growth and Environmental Sustainability"*, menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup yang membahayakan kehidupan manusia di seluruh dunia adalah:

> "Terdapatnya sulfur dioksida, dioksida nitrogen, dan berbagai bahan kimia di udara pada tingkat tinggi…kontaminasi air tanah dan tanah oleh bahan kimia, pestisida, dan racun metal yang mengandung nitrogen; kontaminasi sungai oleh kotoran saluran pembuangan dan industri, dan berbagai benda fisik, biologis, psikososial, dan berbahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia di tempat kerja" (1992:62).

Dari berbagai penafsiran di atas kita dapat melihat bahwa saat ini kerusakan lingkungan hidup tidak terlepas dari perbuatan manusia dalam hal melakukan pekerjaan sehari-hari yang tidak berhubungan langsung dengan lingkungan maupun kegiatan mengelola serta mengambil apa saja yang dimiliki lingkungan hidup itu secara langsung. Dengan jumlah manusia yang terus bertambah di bumi ini kita dapat membayangkan bagaimana menurunnya kualitas lingkungan hidup dari waktu ke waktu, dan hal tersebut merupakan masalah serius.

Ekins dalam *"Economic Growth and Environmental Sustainability"* menyatakan bahwa persoalan lingkungan hidup dapat dipengaruhi oleh persoalan ekonomi yang dihadapi suatu negara, dan dapat pula terjadi

sebaliknya, namun biasanya masalah ekonomilah yang mempengaruhi baik tidaknya kualitas lingkungan hidup di negara yang bersangkutan (2000:1-22).

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen sebelumnya, persoalan lingkungan hidup dapat juga ditinjau dari bagaimana kerjasama internasional dipengaruhi oleh ekonomi di mana penyebaran industri terjadi dari negara-negara maju ke negara berkembang dan secara singkat negara berkembang mengalami penurunan kualitas hidupnya.

Erwin dalam *"Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup"* mengemukakan bahwa untuk menyikapi persoalan lingkungan hidup secara serius maka digelarlah empat konferensi internasional yakni Konferensi Stockholm pada tahun 1972, Konferensi Nairobi dan WCED pada tahun 1982, Konferensi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, dan Konferensi Rio+5 pada tahun 1997. Konferensi Stockholm adalah konferensi lingkungan hidup pertama yang diatur oleh PBB.

Sebanyak 114 negara berkumpul untuk membahas permasalahan negara-negara Eropa sebagai negara-negara yang mengalami akibat revolusi industri dan menjadi cikal bakal terlaksananya konferensi ini adalah laporan seorang inspektur bernama Rubert Angus Smith tentang pencemaran udara di Manchester yang menghasilkan hujan asam. Konferensi ini menghasilkan deklarasi, rencana aksi lingkungan hidup, dan rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan pendukung rencana aksi tersebut (2009:169-170).

Konferensi Nairobi dan WCED dihadiri oleh wakil pemerintah dalam *Government Council* UNEP. Hasil konferensi ini adalah dibentuknya WCED *(World Commision On Environment)* yakni sebuah komisi yang bertujuan melakukan kajian tentang arah pembangunan dunia. Komisi ini melakukan pertemuan di berbagai tempat di belahan dunia, berdialog dengan berbagai kalangan termasuk NGO, dan menghasilkan dokumen *"Our Common Future"* pada tahun 1987, yang membuat analisis dan saran bagi proses pembangunan berkelanjutan (2009:172-173).

Konferensi Rio de Janeiro atau KTT Bumi *(Earth Summit)* mengangkat permasalahan polusi, perubahan iklim, penipisan lapiasan ozon, penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan air, perubahan iklim, meluasnya penggundulan hutan, penggurunan dan degradasi tanah, limbah-limbah yang berbahaya serta penipisan keanekaragaman hayati. Hasil-hasil konferensi ini adalah Deklarasi Rio yang merupakan suatu rangkaian dari 27 prinsip universal yang bisa membantu mengarahkan tanggungjawab dasar gerakan internasional terhadap lingkungan dan ekonomi.

Konvensi Perubahan Iklim yakni sebuah kesepakatan hukum yang mengikat ditandatangani oleh 152 pemerintahan pada saat konferensi berlangsung, Konvensi Keanekaragaman Hayati yang menguraikan berbagai langkah ke depan dalam pelestarian keragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan berbagai komponennya, Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan yang mengatur kebijakan nasional dan internasional dalam bidang kehutanan,

dan Komisi Berkelanjutan yang bertujuan memastikan keefektifan tindak lanjut KTT Bumi, mengawasi serta melaporkan pelaksanaan Konferensi Bumi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Selain lima hasil KTT Bumi di atas, masih terdapat satu lagi hasil lainnya yakni Agenda 21, yang merupakan sebuah program luas mengenai gerakan yang mengupayakan berbagai cara baru dalam berinvestasi di masa depan untuk mencapai pembengunan berkelanjutan global di abad XX1 (2009:172-175). Salah satu pokok Agenda 21 yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah *Conservation and Management of Resources for Development.* Dalam pokok tersebut terdapat berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yakni proteksi atmosfer, pemeliharaan sumber air tawar, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Konferensi terakhir yang dilakukan adalah Konferensi Rio+5 yang membahas tentang berbagai tantangan dalam melaksanakan Agenda 21 yang salah satunya adalah kekuarangan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih di lapangan pembangunan berkelanjutan, akses teknologi lingkungan hidup yang aman, ketidakcukupan serta keterbatasan sumber keuangan yang dikemukakan oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Sarwono Kusumaatmaja (2009:175). Dari dilaksanakannya empat konferensi lingkungan hidup tersebut di atas kita dapat mengetahui bahwa isu lingkungan

hidup merupakan salah satu isu global lainnya dalam fokus hubungan internasional saat ini.

Jika kita berbicara tanggungjawab maka secara umum kita dapat mengatakan bahwa masalah lingkungan hidup adalah persoalan yang sebaiknya ditangani bersama secara adil. Dengan demikian semua negara memiliki tanggungjawab yang sama atas lingkungan hidup, secara khusus negara maju bertanggungjawab pula atas kerusakan lingkungan yang terjadi di negara berkembang.

2.2.1.6. Konsep Pemanasan Global

Salah satu persoalan terbesar yang sampai saat ini menjadi fokus utama dalam hubungan internasional dalam konteks lingkungan hidup adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat berkurangnya jumlah pohon yang berfungsi melindungi bumi dari sinar matahari. Dengan berkurangnya pohon, sinar matahari yang masuk akan langsung dipantulkan oleh permukaan bumi dan dipantulkan lagi oleh lapisan ozon sehingga suhu bumi akan meningkat karena tidak ada benda yang tepat untuk meredam panas yang diakibatkan oleh sinar matahari tersebut.

Jika hal tersebut terus menerus terjadi maka lapisan ozon akan makin menipis, seperti pemikiran Hongton melalui Ekins dalam *"Economic Growth and Environmental Sustainability"* yang menyatakan bahwa "Rusaknya

lapisan ozon pada lapisan atmosfir bagian atas menyebabkan pendinginan sebagai akibat efek rumah kaca" (1996:20).

Konsekuensi dari panas yang bertahan di bumi akan mengakibatkan melelehnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan yang akan membuat suhu bumi turun drastis, menambah air laut dan pada akhirnya menyebabkan banjir yang kemungkinan besar akan menenggelamkan semua daratan tempat manusia tinggal. Hal ini sesuai dengan pemikiran Broome melalui Ekins dalam *"Economic Growth and Environmental Sustainability"* yang menyatakan bahwa: "Pemanasan global yang disebabkan oleh manusia selanjutnya akan menimbulkan serangkaian kejadian yang dapat membawa kepunahan peradaban atau bahkan kemanusiaan. Hal ini adalah kemungkinan yang masih jauh, namun kemungkinan ini ada" (1992:6).

Di sini kita melihat bahwa pemanasan global dari awalnya telah menimbulkan kerugian bagi manusia seperti yang dikemukakan oleh Baylis dan Smith pada bagian sebelumnya di mana pemanasan global dapat meningkatkan kualitas penyakit, terutama penyakit yang dapat mengancam nyawa manusia, dan jika pemanasan global mencapai puncaknya di mana cuaca diperkirakan akan berubah dingin secara drastis, mengakibatkan perubahan iklim yang tidak seharusnya terjadi dan akhirnya semua daratan tenggelam, maka dapat dikatakan bahwa pemanasan global yang dibiarkan tidak terkendali akan membunuh umat manusia.

2.2,1.7. Kepunahan Spesies Hewan dan Tumbuhan

Masalah lain yang menjadi fokus hubungan internasional dalam konteks lingkungan hidup adalah kepunahan spesies hewan dan tumbuhan. Hutan yang merupakan salah satu ekosistem lingkungan hidup memiliki banyak pohon yang berfungsi sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan, mereka berlindung dan memperoleh sumber makanan di antara kerindangan pepohonan yang ada.

Kepunahan mereka disebabkan oleh menurunnya jumlah pohon akibat penebangan, perburuan, peralihan hutan untuk keperluan manusia, dan masih banyak lagi. Myers melalui Ekins dalam *"Economic Growth and Environmental Sustainability"* menyatakan bahwa:

> "Ketika kita menganggap bahwa hanya jumlah yang menjadi masalah, dengan jangka waktu episode-episode kejadian, kita mengetahui bahwa kita sedang mengalami episode kepunahan yang terjadi selama empat milliar tahun sejak awal terjadinya evolusi… Kepunahan tersebut dapat dikatakan sebagai meningkatnya kemiskinan spesies di bumi sejak kehidupan di bumi ini berawal" (1986:4).

Dapat dikatakan bahwa potensi terjadinya kepunahan spesies hewan dan tumbuhan muncul sejak awal kehidupan ada di bumi, di manusia, hewan, dan tumbuhan hidup bersama. Ketika manusia melakukan pekerjaannya yang mempengaruhi lingkungan hidup, maka potensi kepunahan tersebut akan menjadi kenyataan seiring terjadinya evolusi dan pertambahan jumlah manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan yang sebagian besar dicapai

dengan apa yang ia dapatkan dari lingkungan hidupnya. Keseimbangan ekosistem menjadi hal yang dipertaruhkan ketika jumlah kepentingan manusia melampaui kapasitas lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kepunahan spesies hewan dan tumbuhan.

Keseimbangan ekosistem dan interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan dua hal yang saling mempengaruhi dan tidak terpisahkan sesuai dengan apa yang dinyatakan *World Bank* melalui Ekins dalam *"Economic Growth and Environmental Sustainability"* yakni "Jaringan kompleks kehidupan yang mempertahankan vitalitas ekosistem dapat mengalami gangguan walaupun hanya sedikit spesies yang menghilang" (1992:39).

2.2.1.9. Sumber Air Tawar

Kehidupan manusia tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan air tawar bagi keperluan hidup seperti minum dan lainnya. Jika kita melihat fenomena pertumbuhan populasi penduduk dunia yang cukup pesat, maka kita pun dapat mengetahui bahwa keberadaan hutan akan semakin langka. Hutan yang berfungsi sebagai penahan air hujan selanjutnya menjalankan fungsinya sebagai pengatur dan penyimpan air tawar. Secara garis besar Effendi dalam *"Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan"* membagi air tawar menjadi dua jenis yakni:

1. Air permukaan yang terdapat di sungai, danau, waduk, rawa, dan badan air lain yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah. Sekitar 69% air yang masuk ke sungai berasal dari hujan, pencairan salju (terutama untuk wilayah ugahari), dan sisanya berasal dari air tanah.

   Selanjutnya air permukaan dibagi lagi menjadi dua macam yakni perairan tergenang dan perairan mengalir. Perairan tergenang meliputi danau, kolam, waduk, rawa dan sebagainya. Danau dicirikan dengan arus lambat atau tidak ada arus sama sekali. Oleh karena itu waktu tinggal air dapat berlangsung lama dan arus air di danau dapat bergerak ke berbagai arah (2003:30-31).

   Perairan mengalir yang sering tampak adalah sungai, dicirikan oleh arus searah dan relatif kencang serta dipengaruhi oleh waktu, iklim dan pola drainase. Kecepatan arus, erosi, dan sedimentasi merupakan fenomena yang biasa terjadi di sungai sehingga kehidupan flora dan fauna dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut (2003:42-43).
2. Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah. Ciri utama yang membedakan air tanah dari air permukaan adalah pergerakan yang lambat dan waktu tinggal lama, dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Karena dua hal tersebut air tanah akan sulit untuk pulih kembali jika mengalami pencemaran.

   Pada dasarnya air tanah dapat berasal dari air hujan, baik melalui proses infiltrasi secara langsung ataupun tidak langsung dari air sungai,

> danau, rawa dan genangan air lainnya. Dinamika pergerakan air tanah pada hakikatnya terdiri atas pergerakan horizontal air tanah; infiltrasi air hujan, sungai, danau, dan rawa ke lapisan akifer; dan menghilangnya atau keluarnya air tanah memasuki sungai dan berbagai tempat lain yang merupakan saluran keluarnya air tanah (2003:44-46).

Melihat berbagai kriteria di atas kita dapat mengetahui bahwa provinsi Jawa Barat termasuk Jakarta memang bergantung seutuhnya pada hutan Pangrango dalam pendapatan sumber air tawar baik yang berasal dari permukaan maupun bawah tanah. Dapat dibayangkan bahwa Jawa Barat akan mengalami peningkatan krisis air tawar yang layak dikonsumsi manusia jika hutan Pangrango tidak mendapatkan penanganan konservasi secara serius

Selain untuk minum masyarakat Jawa Barat sering menggunakan berbagai danau, telaga dan sungai untuk melakukan penanaman padi dan budidaya ikan air tawar yang selanjutnya berperan sebagai makanan pokok dan sumber penghasilan bagi masyarakat pinggiran kota.

Persoalan krisis air tawar itu sendiri sudah menjadi persoalan lingkungan hidup yang serius, berbanding lurus dengan persoalan kerusakan hutan di dunia. Barlow dan Clarke dalam *"Blue Gold; Perampasan dan Komersialisasi Sumber Daya Air"* menyatakan bahwa:

> "Situasi demikian tampaknya diam-diam menyerang diri kita. Hingga dekade terakhir, studi mengenai air bersih hanya dilakukan oleh sekelompok kecil ahli-para ahli hidrologi, teknik sipil, perencana kota, peramal cuaca, dan mereka yang berminat dalam suatu hal yang justru sering diremehkan oleh sebagian

> besar dari kita. Akan tetapi, sekarang makin banyak pihak-*Worldwatch Institute, World Resources Institute, United Nations Environment Programme, International Rivers Network, Greenpeace, Clean Water Network, Sierra Club* dan *Friends of The Earth International,* bersama-sama dengan ribuan kelompok masyarakat di seluruh dunia mulai membuka mata: krisis global air bersih mungkin adalah ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup planet kita". (2005: xii-xiii)

Dapat dibayangkan akan banyak terjadi kematian akibat kehausan akan air tawar yang layak dikonsumsi. Tidak ada seorang pun sekarang yang dapat bersikap seolah-olah tidak terjadi masalah apapun pada kebutuhan mereka akan air bersih sehingga walupun pekerjaan yang berkaitan dengan persoalan ini masih hanya digeluti oleh orang yang bekerja dari bidang tertentu saja, *urgency* akan krisis air akhirnya membuat semua orang semakin bersikap waspada dan secara aktif menggunakan sumber daya air tawar dengan lebih bijak.

Persoalan ini pun menjadi bahan pertimbangan *United Nations Environment Program* (UNEP) melalui Barlow dan Clarke dalam *"Blue Gold; Perampasan dan Komersialisasi Sumber Daya Air"* yang menyatakan bahwa: "Karena kurangnya perubahan tingkah laku manusia dan pemerintah, hutan-hutan dunia yang berkanopi luas yang masih tersisa dan dengan keanekaragaman hayati di dalamnya pasti akan hilang dalam beberapa dekade mendatang" (2005:49).

Pernyataan ini merujuk pada penelitian yang dilakukan UNEP pada tahun 2001 yang menghasilkan laporan yang berjudul *"Sebuah Penilaian atas*

Status Hutan-Hutan Dunia yang Masih Tertutup", yang meneliti jumlah hutan di dunia yang memiliki kanopi cukup besar untuk mendukung daerah aliran air dan kehidupan. Selanjutnya dinyatakan bahwa hanya seperlima dari bumi yang masih ditutupi oleh hutan berkelanjutan, dan hanya sedikit di antaranya yang dilindungi oleh pmerintah. Yang memprihatinkan, hutan-hutan yang tersisa ini masih terus saja diserang dari berbagai penjuru (2005:49).

Dapat dikatakan bahwa hutan TNGGP merupakan salah satu dari berbagai hutan konservasi yang memiliki peran yang hampir mutlak bagi ekosistem Jawa Barat secara keseluruhan, terutama karena ia mengakomodir kehidupan di dalam dan luarnya dengan menyediakan cadangan air tanah yang cukup banyak sekaligus titik awal mengalirnya berbagai sungai yang airnya dibendung maupun mengisi berbagai cekungan sehingga terbentuk berbagai danau, telaga dan lainnya, yang keberadaannya berarti bagi berbagai pemanfaatan air dari sekadar minum hingga menjadi sumber mata pencaharian Jawa Barat yang populasinya terus naik.

2.2.2. Kerangka Pemikiran Konseptual

2.2.2.1. Konsep Peran

Mas'oed dan Arfani dalam *"Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi"* menyatakan bahwa "Peran adalah perilaku yang diharapkan seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi

tersebut" (1994:30). Dengan kata lain posisi seseorang atau organisasi dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu atau organisasi tersebut dalam masyarakat. Dengan begitu seseorang atau sebuah organisasi akan menjalankan perannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.

Coser dan Rosenberg dalam *"An Introduction to International Politics"* mendefinsikan peran sebagai: "Tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggungjawab) di mana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi" (1976:232-255).

Di sini kita melihat bahwa peran suatu entitas baik itu individu maupun organisasi tidak terlepas dari tanggungjawab dan harapan entitas tersebut yang dicapai melalui kesulitan yang menguji dan kemudahan yang mendukung fungsinya dalam masyarakat. Dengan kata lain menjalankan peran tentu entitas tersebut akan mengalami dinamika di mana berbagai kesulitan, masalah, dan bagaimana ia menggunakan kemudahan serta kesempatan yang ada untuk menyelesaikan masalah yang ada akan membuat orang lain melihat bahwa ia memang mampu berfungsi dengan baik.

Levinson melalui Mas'oed dalam *"Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi"* menyatakan peran mencakup tiga hal yakni:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (1994:35).

Peranan INGO khususnya yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup tidak bisa dipandang remeh karena ia benar-benar menjalankan peran tersebut demi kenyamanan kehidupan sosial manusia serta pelestarian lingkungan hidup, yang kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Peran pelestarian lingkungan hidup sudah jelas merupakan sebuah tuntutan struktural yang menentukan hajat hidup masyarakat dunia.

Khusus di Indonesia, tuntutan tersebut dilakukan oleh salah satu INGO yakni CI yang membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan konservasi laut maupun darat di berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Irian Jaya melalui berbagai program yang memiliki orientasi pemberdayaan masyarakat sekitar untuk membuat mereka lebih mengenal dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup tempat mereka tinggal.

Jawa Barat telah menjadi salah satu fokus penanggulangan masalah lingkungan hidup internasional. CI sebagai INGO lingkungan hidup telah

melakukan perannya sampai sekarang demi menciptakan keseimbangan ekosistem di Jawa Barat sampai saat ini. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) adalah salah satu hutan besar di Jawa Barat yang mendapatkan penanganan konservasi.

2.2.2.2. Konsep Hutan

Dengler melalui Salim dalam *"Dasar-Dasar Hukum Kehutanan"* mendefinsikan hutan sebagai:

> "Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal) (1975:3).

Dari definisi ini kita dapat melihat bahwa suatu tempat dapat dikatakan sebagai hutan jika tempat tersebut ditumbuhi oleh pepohonan yang jaraknya cukup rapat antara satu sama lain sehingga jumlah pohon yang ada mampu mengubah suhu udara di sekitarnya menjadi lebih sejuk. Sedangkan Arief melalui Indriyanto dalam *"Pengantar Budi Daya Hutan"* mendefinsikan hutan sebagai "Suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis" (2008:6).

Selanjutnya konsep hutan diperlengkap dengan pemikiran bahwa hutan tidak hanya sebatas sekumpulan pohon yang tumbuh pada lapangan luas, tetapi juga merupakan suatu ekosistem yang berharga di mana dalam sebuah hutan hidup berbagai hewan dan jenis tumbuhan lainnya yang saling bergantung satu sama lain. Secara lebih lanjut UU RI Pasal 6-7 No. 41 Tahun 1999 melalui Salim dalam *"Dasar-Dasar Hukum Kehutanan"* menggolongkan hutan berdasarkan kegunaannya yakni:

1. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu kawasan huta suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.

   Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyanggah kehidupan.

   Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok dan perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah penerobosan air laut, memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (2004:44-45).

Jika merujuk pada berbagai jenis hutan di atas, maka hutan TNGGP merupakan hutan konservasi yang digolongkan dalam hutan suaka dan pelestarian alam karena ia berfungsi sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Aryo dalam buku *"Mengenal Satwa Taman Nasional Gunung Gede Pangrango"* menyatakan bahwa hutan tersebut merupakan tempat tinggal empat jenis hewan yang terancam punah yakni owa, elang, macan tutul Jawa, dan Surili (2010:8).

Selanjutnya Ngadung melalui Salim dalam *"Dasar-Dasar Hukum Kehutanan"* menyatakan manfaat-manfaat hutan yakni:

1. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain.
2. Manfaat tidak langsung yaitu manfaat hutan sebagai pengatur tata air, pencegah erosi, manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam

bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara (2004:46-48).

Hutan TNGGP dapat dikatakan memiliki manfaat tidak langsung karena ia berfungsi sebagai penahan dan penampung air tanah, memberikan manfaat kesehatan kepada penduduk Jawa Barat dengan menetralisir udara di provinsi tersebut, memberikan manfaat ekoswisata karena hutan tersebut memberikan keindahan alam dan pendidikan yang dapat meningkatkan pendapatan provinsi Jawa Barat, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa Indonesia di sektor pariwisata. Berdasarkan konsep inilah hutan memerlukan upaya pelestarian dari manusia agar ekosistem alam secara keseluruhan tetap terjaga.

2.2.2.3. Konservasi Hutan

Keberadaan hutan merupakan persoalan serius bagi manusia, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya konservasi demi mempertahankan keberadaan serta kualitas fungsi hutan tersebut. UU RI Nomor 4 Tahun 1992 melalui Salim dalam *"Dasar-Dasar Hukum Kehutanan"* mendefinisikan konservasi sebagai: "Pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya tersebut menjamin kesinambungan untuk persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman" (2004:45).

Selanjutnya kita dapat melihat tujuan-tujuan konservasi yakni:

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan yang membangun Indonesia seutuhnya.
2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara bijaksana.
3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
5. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan (2004:45-46).

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melalui Satriago dalam *"Himpunan Istilah Lingkungan untuk Manajemen"* mendefinsikan konservasi sebagai "Pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan" (1996:12). Dari berbagai pengertian di atas kita dapat melihat bahwa keberadaan hutan sebagai bagian lingkungan hidup membutuhkan kepedulian dan tanggungjawab manusia secara beraturan.

Persoalan konservasi hutan itu sendiri sudah menjadi fokus dalam hubungan internasional, dan hal ini diperkuat oleh Erwin dalam *"Hukum Lingkungan dalam Sistem Pembangunan Lingkungan Hidup"* mengemukakan bahwa terdapat empat kongres internasional yang membahas persoalan hutan.

Kongres-kongres tersebut antara lain adalah *World Conservation Strategy* pada tahun 1980, Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia III di Bali pada tahun 1982, Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia IV di Caracas pada tahun 1992, Kongres Taman Nasional Sedunia V di Durban Afrika Selatan pada tahun 2003, dan Perlindungan Binatang Liar.

World Conservation Strategy dibuat oleh tiga lembaga dunia yang berpengaruh yakni UNEP, IUCN, dan WWF dalam bentuk sebuah buku. Konservasi menurut strategi ini diarahkan pada tiga tujuan pokok yaitu memelihara berbagai proses ekologi dan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman genetik, serta terjaminnya pemanfaatan spesies dan ekosistem secara lestari.

Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia III merupakan wujud pemikiran tentang perlunya membangun taman nasional sebagai salah satu bentuk kawasan konservasi di Indonesia yang sebenarnya telah dirumuskan sejak awal tahun 1970an. Selain itu kongres ini merupakan upaya menindaklanjuti berbagai isu internasional tentang lingkungan dan konservasi, menghimbau perlunya perluasan jaringan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya, baik nasional, regional maupun internasional, serta perlu pula dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi SDA dan lingkungan hidup.

Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia IV memperkirakan adanya percepatan perubahan global dan menyarankan agar dilakukan pertemuan global pada tahun 1997 untuk memantau arah perkembangan dan kemajuan dari pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam rencana aksi di Caracas. Perubahan yang dihadapi kawasan konservasi pada abad XXI adalah:

1. Perubahan titik pandang kawasan konservasi dari konsepsi "kepulauan" menjadi jaringan kerja.
2. Kawasan konservasi menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan publik bagi kawasan-kawasan lain di sekitarnya.
3. Kawasan konservasi dapat dikelola oleh masyarakat, untuk serta bersama masyarakat, bukan memandang masyarakat sebagai lawan atau masalah.
4. Membangun kapasitas secara terus menerus untuk mencapai standar pengelolaan.

Kongres Taman Nasional Sedunia V mengemukakan bahwa keberadaan kawasan konservasi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi dan masyarakat sekitarnya. Dalam kongres ini terdapat empat hal yang menjadi prioritas tindakan konservasi dari tahun 2004-2014 mendatang, yaitu peranan kawasan konservasi dalam pelestarian keanekaragaman hayati, sistem kawasan konservasi dalam kaitan dengan kondisi bentang alam daratan

dan perairan laut di sekitarnya, serta perbaikan kualitas, efektivitas, dan pelaporan kawasan konservasi.

Peranan kawasan konservasi dalam pelestarian keanekaragaman hayati meliputi berbagai tindakan salah satunya adalah mengupayakan sistem kawasan konservasi yang dapat mewakili keseluruhan perwakilan ekosistem yang ada, sehingga potensi keanekaragaman hayati yang ada dapat dilestarikan secara keseluruhan, dan berupaya menanggulangi ancaman bahaya kepunahan keanekaragaman hayati akibat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan dan pemanfaatan SDA hayati untuk menunjang kebutuhan hidupnya (2009:177-180).

Dalam konteks ini, upaya pelestarian hutan dibuat dalam bentuk yang mampu dimengerti masyarakat secara serius, karena masyarakat juga adalah bagian dari ekosistem yang secara otomatis dilibatkan dalam upaya konservasi. Dengan kata lain, masyarakat terus disadarkan bahwa mereka membutuhkan dan bertanggungjawab memelihara sebuah hutan melalui konservasi.

Selanjutnya, Erwin dalam *"Hukum Lingkungan dalam Sistem Pembangunan Lingkungan Hidup"* menyatakan bahwa sistem kawasan konservasi dalam kaitan dengan kondisi bentang alam daratan dan perairan laut di sekitarnya menyatakan berbagai hal menyangkut hakikat sebuah kawasan konservasi, salah satu di antaranya adalah keberadaan kawasan konservasi umumnya tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri secara

berkelanjutan, namun terkait erat keberadaannya dengan berbagai sistem dan pengembangan masyarakat di sekitarnya, serta suatu sistem yang mewakili sosio-ekosistem yang diusulkan sebagai target kunci konservasi kawasan pada tingkat ekosistem, berguna untuk melindungi komponen individu, ketergantungan spesies, habitat, dan bentang alam (2009:181-182).

Dalam konteks ini, hutan sebagai sebuah kawasan konservasi memerlukan kepedulian masyarakat sekitarnya agar hutan tersebut tidak hilang dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut. Dengan demikian apa yang menjadi keyakinan kaum ekoradikal yang dikemukakan sebelumnya sesuai dengan kaitan sebuah kawasan konservasi dengan manusia itu sendiri dalam sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Erwin dalam *"Hukum Lingkungan dalam Sistem Pembangunan Lingkungan Hidup"* menyatakan bahwa perbaikan kualitas, efektivitas, dan pelaporan pengelolaan kawasan konservasi meliputi salah satu upaya yakni meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola, peraturan yang memungkinkan kawasan konservasi dapat dikelola secara efektif dan efisien, serta pemantauan dan pelaporan untuk mendukung pengelolaan secara lebih baik (2009:182-183).

Hutan TNGGP adalah salah satu contoh hutan yang mendapatkan penanganan konservasi dari pemerintah sehigga ia dibentuk sebagai taman nasional yang dipertahankan keberadaanya sampai sekarang. Jika kita merujuk pada berbagai kongres kehutanan di atas, maka sudah barang tentu pemerintah

Indonesia mempertanggungjawabkan keberadaan hutan sesuai dengan amanat dan ketentuan yang terdapat dalam berbagai kongres di atas.

2.2.2.4. Lingkungan Hidup di Indonesia

World Bank melalui Ekins dalam *"Economic Growth and Environmental Sustainability"* menyatakan bahwa:

> "Isu lingkungan hidup itu sendiri dapat dibagai menjadi dua bagian yakni isu lingkungan global atau bersama seperti air, atmosfir, dan sebagainya. Serta isu lingkungan yang memiliki arti penting bagi seluruh dunia namun tidak secara langsung melibatkan masalah bersama global (keanekaragaman hayati, degradasi hutan, dan sebagainya. Isu lingkungan hidup yang penting untuk menjadi *urgency* pada abad ini adalah isu pemanasan dan perubahan iklim global" (2000:138).

Jika kita menelusuri lebih lanjut maka isu lingkungan hidup yang lebih khusus di mana keanekaragaman hayati seperti spesies hewan dan tumbuhan yang berharga sekarang ini dialami sebagian besar oleh negara berkembang. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa negara-negara berkembang merupakan tempat di mana penanaman modal sebagai wujud upaya pencapaian ekonomi politik negara maju terjadi, mereka menjadi lahan industri yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup negara berkembang.

Secara geografis kita dapat melihat langsung bahwa negara-negara berkembang tersebut merupakan tempat tinggal spesies hewan dan tumbuhan yang unik, dan mereka memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan

merupakan wilayah yang subur secara umum. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya di mata internasional dan menunjukkan berbagai indikasi di atas merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berjuang dalam memperbaiki berbagai fungsi lingkungan hidup yang ia miliki baik darat maupun laut.